



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Palu, 26 Mei 2025

Nomor : 000.8.3.4/190/PO.ORG.
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Dokumen
Perihal : Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pelayanan Publik Mandiri Tahun 2024

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tengah (Terlampir)
di –
Tempat

Dalam rangka upaya peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP). Selanjutnya Kementerian PANRB menginstruksikan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melalui Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Secara Mandiri yang bertujuan untuk penilaian kinerja penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan hasil **Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah** berdasarkan **Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri** terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di

lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang telah dilakukan pada 21 Oktober – 01 November Tahun 2024. Adapun hasil evaluasi menunjukkan beberapa poin yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut yakni sebagai berikut :

1. Dalam mendukung Misi ke-4 Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yakni "**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih, Inovatif, Kolaboratif serta Keamanan Daerah yang Tangguh berlandaskan Nilai Religius dan Kearifan Lokal**", Biro Organisasi tergabung dalam Program **Berani Berintegritas** dimana dengan pelaksanaan PEKPPP Mandiri menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan *Penyelenggaraan* Pelayanan Publik pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah agar tercipta Budaya Kerja Birokrasi yang Bersih, Akuntabel dan Inovatif;
2. Laporan Hasil evaluasi (LHE) akan di Ekspose pada Saat observasi lapangan pada masing -masing Perangkat Daerah dan kemudian akan dilakukan Pendampingan oleh Tim Evaluator pada Biro Organisasi sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Perangkat Daerah **diharapkan dapat menindaklanjuti rekomendasi dan catatan evaluator yang tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE)** pada saat pelaksanaan evaluasi yang telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah, Pejabat Teknis Yang Membidangi Pelayanan Publik dan Evaluator;
4. Berikut terlampir *link* Dokumen Laporan Pelaksanaan PEKPPP Mandiri Tahun 2024 <https://bit.ly/pekpppmandiri24> .

GUBERNUR SULAWESI TENGAH



Lampiran I

Nomor : 000.8.3.4/190/Ro.Org.

Tanggal : 26 Mei 2025

Hasil penilaian tersebut dengan interval nilai poin yang terbagi dalam 7 (tujuh) kategori sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai	Predikat	Interpretasi
1.	A	4,51-5,00	Pelayanan Prima	Perangkat daerah yang sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundangan-undangan
2.	A-	4,01-4,50	Sangat Baik	Perangkat daerah sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundanganundangan tetapi masih ada kekurangan di beberapa indikator
3.	B	3,51-4,00	Baik	Perangkat daerah sudah menerapkan kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, memiliki sarana prasarana yang baik, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal.
4.	B-	3,01-3,50	Baik (Dengan Catatan)	Perangkat daerah sudah menerapkan sebagian kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundanganundangan, memiliki sarana prasarana yang baik dengan beberapa catatan, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal.

5.	C	2,51-3,00	Cukup	Perangkat daerah belum mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik secara optimal, kapasitas SDM masih perlu pengembangan, sarana prasarana belum memadai, inovasi belum Inditerapkan sebagai kebutuhan.
6.	C-	2,01-2,50	Cukup (Dengan Catatan)	Perangkat daerah hanya sebagian mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik, kapasitas SDM kurang memadai, ketersediaan sarana prasarana tidak lengkap dan kurang memadai, sistem informasi sebagian besar masih manual dan belum terdapat inovasi.
7.	D	1,51-2,00	Buruk	Perangkat daerah yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya.
8.	E	1,01-1,50	Sangat Buruk	
9.	F	0-1,00	Gagal	

Adapun hasil dari pelaksanaan PEKPPP Mandiri yakni sebagai berikut :

NO	UNIT LOKUS EVALUASI	ASPEK I	ASPEK II	ASPEK III	ASPEK IV	ASPEK V	ASPEK VI	KATEGORI	IPP
1	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	3,3	3,6	3,67	4,6	3,7	4,5	B	3,76
2	Inspektorat	3,68	3,8	3,68	4,3	3,75	2	B	3,58
3	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	3,36	2	3,54	4,8	4,25	3,5	B-	3,31
4	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	2,95	2,7	3,46	4,3	3,95	3	B-	3,23
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2,24	2,6	3,5	4,3	2,95	3,5	C	3
6	Sekretariat DPRD	2,95	1,2	4,7	2,7	3,65	1,5	C	2,69
7	Dinas Kehutanan	1,85	3,3	3,67	3,8	1,1	1,5	C	2,63
8	Badan Kepegawaian Daerah	1,46	2,6	3,6	4,3	2,75	2	C	2,63
9	RSUD Madani	0,82	1,4	4,45	4,3	3,35	4	C	2,63

NO	UNIT LOKUS EVALUASI	ASPEK I	ASPEK II	ASPEK III	ASPEK IV	ASPEK V	ASPEK VI	KATEGORI	IPP
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2,86	1,1	3,94	3,9	1,5	3	C	2,6
11	Badan Riset dan Inovasi Daerah	2,95	1,6	3,75	4,8	1,9	0,5	C	2,52
12	Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik	1,33	2,1	3,24	3,8	3,2	3	C	2,52
13	Dinas Cipta Kerja dan SDA	2,29	0,6	4,38	3,4	2,2	3,5	C-	2,5
14	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,25	2,1	4,39	4	1,45	2,5	C-	2,5
15	Dinas Pangan	0,88	3	4,29	3,8	3,05	0	C-	2,45
16	Dinas Lingkungan Hidup	2,49	2,6	2,02	4	1,9	1,5	C-	2,42
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2,68	2,3	3,88	3,1	1,4	0	C-	2,39
18	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	1,5	1,4	3,57	3,7	1,65	2,5	C-	2,22
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1,29	1,2	4,04	4,4	2,95	0	C-	2,11
20	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	0,81	1,7	2,64	2,9	2,5	2,5	D	1,96
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	1,53	0,9	3,37	3,5	2,05	1,5	D	1,96
22	Dinas Pendidikan	1,46	0,9	3,13	2,6	1,5	3	D	1,93
23	Badan Pendapatan Daerah	0,99	1,8	2,97	3,1	1,3	2	D	1,93
24	Dinas Pariwisata	1,42	1,1	3,94	3,3	2,25	0	D	1,91
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1,53	1	3,97	3,5	1,15	0	D	1,83
26	Satuan Polisi Pamong Praja	0,95	0,3	2,99	4,3	0	3,5	D	1,73
27	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1,71	0,7	3,83	3,1	0,45	0,5	D	1,72
28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	1,46	1,4	3,19	2,5	1,7	0	D	1,71

NO	UNIT LOKUS EVALUASI	ASPEK I	ASPEK II	ASPEK III	ASPEK IV	ASPEK V	ASPEK VI	KATEGORI	IPP
29	Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan	1,05	0,8	3,06	3,4	2	0	D	1,57
30	Dinas Perkebunan dan Perternakan	1,3	0,4	1,95	2,5	1,25	3	D	1,52
31	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	1,64	0,8	2,9	2,6	1,05	0	E	1,5
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1,02	0,5	2,86	2,9	1,4	0	E	1,34
33	Dinas Pemuda dan Olahraga	1,67	0,4	1,69	3,1	1,45	0	E	1,29
34	Dinas Kesehatan	0,48	1	1,95	3,5	1,2	0	E	1,22
35	Dinas Perhubungan	1,22	0,4	2,52	2,6	0,8	0	E	1,21
36	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2,47	0	0,79	2,3	1,55	0,5	E	1,2
37	Dinas Kebudayaan	0,72	0,2	1,96	1,5	1,05	0	F	0,82
38	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,92	0	1,05	3,1	0,45	0	F	0,79
Rata-Rata		1,75	1,46	3,22	3,49	1,99	1,55	C-	2,13